

# IMPLIKASI KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CINA TERHADAP KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA INDONESIA

**Rahmi Fitriyanti**

FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: pipitfitriyanti77@gmail.com

## **Abstract**

The 21<sup>st</sup> Silk Road Maritime policy (SRM)) that has been introduced in October 2013 during Xi Jinping administration is aimed to sponsor the development of transportation facilities from China to Southeast Asia, South Asia, the Middle East, Europe and Africa. China intends to protect the SRM expansively in order to gain control over sea line of communications (SLCs), market, as well as energy resources and raw materials. The objective is to create “the China dream”. The policy has several implications to Indonesia which also has global maritime nexus (GMN) agenda which wants to make Indonesia as the center of regional and global maritime economics activities. This raise a question of why the China’s Silk Road Maritime (SRM) policy affects the Global Maritime Nexus (GMN) policy of Indonesia?. Therefore, this article will focus on the implications of China SRM on Indonesia GMN. The analysis is limited to SRM policy that has negative impacts internally and externally on Indonesia’s maritime power. Theoretical frameworks for analysis are sea power and foreign policy analysis.

Keywords: China’s Silk Road Maritime, Indonesia’s global maritime nexus, sea power, foreign policy

## **Abstrak**

Kebijakan Jalur Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21 dalam masa kepemimpinan Presiden Cina, Xi Jinping yang mulai diperkenalkan pada Oktober 2013 bertujuan mensponsori pembangunan prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Cina berupaya melindungi rute JSM secara ekspansif agar dapat mengendalikan jalur pelayaran strategis dunia (*Sea Line of Communications/SLOCs*), pasar untuk produk Cina (*market*), serta sumber daya alam untuk energi, bahan mentah, dan bahan baku ke Cina (*resources*). Tujuannya adalah mewujudkan ambisi “*Chinese Dream*”. Kebijakan tersebut menimbulkan implikasi bagi kekuatan maritim Indonesia yang juga menerapkan visi Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai “pusat” kegiatan ekonomi maritim regional dan global sejak awal era Presiden Joko Widodo pada 2014. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, yakni “Mengapa kebijakan Jalur Sutra Maritim Cina berimplikasi terhadap kekuatan Poros Maritim Dunia Indonesia?” Oleh karena itu, fokus tulisan ini adalah mengkaji implikasi kebijakan JSM Cina terhadap kekuatan PMD Indonesia. Analisisnya dibatasi hanya pada implementasi kebijakan JSM yang mempengaruhi secara negatif berbagai aspek internal dan eksternal kekuatan maritim Indonesia. Landasan teori yang digunakan adalah *Sea Power* dan Kebijakan Luar Negeri.

Kata Kunci: *Jalur Sutra Maritim Cina, Poros Maritim Dunia Indonesia, Sea Power, Kebijakan Luar Negeri*

## **Pendahuluan**

Lebih dari 150 negara merupakan negara pantai atau negara kepulauan. Hal ini menumbuhkan fenomena kemaritiman dunia yang mempengaruhi tujuan nasional sebagian besar bangsa di dunia. Negara-negara tersebut harus mampu menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Sebagai negara kepulauan dan kelautan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, Indonesia pun harus memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengubah orientasi kebijakannya yang berbasis “darat” menjadi “laut” melalui Poros Maritim Dunia (PMD).

Fenomena tren kebangkitan maritim dunia bermula dari pidato Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang memperkenalkan konsep kemaritiman modern di hadapan Parlemen India pada 22 Agustus 2007 dalam pidatonya “*Confluence of the Two Seas*” (<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>). Pertama kalinya Abe memperkenalkan istilah “Indo-Pasifik” sebagai wilayah laut yang terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan kedua samudera tersebut (<http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name>).

Kemudian, Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, juga memberlakukan kebijakan “*Pivot to the Pacific*” atau “*Rebalancing toward Asia*” pada November 2011 di hadapan Parlemen Australia untuk merespon kebangkitan Cina sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik berikut peran besar yang akan dimainkan AS dalam jangka panjang (Manyin, 2011).

Kebijakan tersebut memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi AS. Dengan adanya *rebalancing*, AS menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan untuk lebih mengarahkan perhatiannya ke kawasan Asia Pasifik guna mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan pada masa mendatang (<http://www.the-american-interest.com>).

Pergeseran geopolitik ke kawasan Asia Pasifik ini didorong oleh pesatnya proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan Laporan Bank Dunia, pergeseran kekuatan ekonomi dunia ke Asia ini terjadi karena empat dari 10 negara ekonomi besar global berasal dari Asia, yaitu, Cina (peringkat 2), India (peringkat 3), Jepang (peringkat 4), dan Indonesia (peringkat 10) (Djumala, 2 Januari 2015).

Kebangkitan ekonomi Cina disusul oleh kebijakan Presiden Cina, Xi Jinping, dengan memperkenalkan kebijakan Jalur Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21 di hadapan parlemen Indonesia pada Oktober 2013 ([http://usa.Cinadaily.com.cn/Cina/2013/10/04/content\\_17008940.htm](http://usa.Cinadaily.com.cn/Cina/2013/10/04/content_17008940.htm)). Kebijakan pembangunan JSM ini terdiri dari empat elemen, yaitu, pembangunan konektivitas maritim yang lebih baik, dibangunnya kerjasama yang kuat di bidang ekonomi dan industri maritim, perlu adanya kerjasama dalam bidang keamanan maritim, serta memperluas kerjasama dalam budaya maritim.

Kebijakan JSM Cina tersebut merupakan bagian dari *11<sup>th</sup> Year Plan* (2006-2010) dan *Report on Marine and Ocean Industries Development in Cina* (2006). Cina berkomitmen membangun serta mensponsori prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Langkah ini ditindaklanjuti dengan menawarkan investasi "*Maritime Silk Fund*" sebesar USD40 miliar untuk membangun pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) di lokasi-lokasi strategis yang dilewati rute JSM Cina agar dapat mengendalikan jalur pelayaran strategis dunia (*Sea Line of Communications/SLOCs*), pasar untuk produk Cina (*market*), serta sumber daya alam untuk energi, bahan mentah, dan bahan baku ke Cina (*resources*) (<http://usa.Cinadaily.com>).

Ketiga akses tersebut memang merupakan rebutan *great powers*, antara lain, AS, Cina, Jepang, India, dan Eropa yang bertujuan mengungguli persaingan kekuatan militer, kekuatan

finansial, serta penguasaan teknologi dunia (<http://www.fmprc.gov>).

Serangkaian peristiwa kemaritiman tersebut menunjukkan persaingan dalam sistem internasional yang anarki di antara kekuatan-kekuatan besar, yaitu adanya keterlibatan AS, India, Jepang, Korea Selatan, serta Rusia. Hal ini kemudian melatarbelakangi kebijakan JSM Cina yang bertujuan memperebutkan akses dan kendali atas tiga hal utama di sepanjang rute pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yaitu, jalur pelayaran, pasar, dan sumber daya alamnya.

Sedangkan tujuan utama kebijakan PMD Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan PMD yang memperjuangkan perlindungan terhadap aset kekayaan maritim Indonesia ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

Tujuan ini terkait dengan perlindungan terhadap aset-aset kekayaan bahari Indonesia terhadap berbagai ancaman eksternal dan internal. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menjadikan perwujudan PMD Indonesia sebagai fokus utama dalam pemerintahannya. Sebagaimana dikemukakan dalam pidato pelantikannya, Jokowi menegaskan pentingnya mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Karenanya, penegakan kedaulatan wilayah laut RI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi

biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan merupakan program utama dalam pemerintahan Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (<http://www.presidentri.go.id/maritim/Indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>).

Untuk itulah Jokowi menyampaikan lima pilar PMD melalui forum global dalam *The 9th East Asia Summit (EAS)* di Naypyidaw, Myanmar, pada 13 November 2014 sebagai berikut: (1) budaya maritim; (2) ekonomi maritim; (3) konektivitas maritim; (4) diplomasi maritim; dan (5) keamanan maritim (<http://dunia.news.viva.co.id>).

Berdasarkan pilar-pilar tersebut, perlindungan terhadap keamanan maritim Indonesia sangat penting untuk mendukung perwujudan keempat pilar lainnya. Pilar keamanan maritim dalam kebijakan PMD mencakup kemampuan Indonesia dalam melindungi kedaulatan maritim, posisi strategis Indonesia, wilayah laut yang luas, serta merespon berbagai kegiatan di wilayah laut Indonesia yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Bentuk ancaman tersebut secara garis besar digolongkan sebagai (1) Ancaman kekerasan berupa pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase; ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut; konflik pengelolaan sumber daya laut, (2) Ancaman pelanggaran hukum berupa *illegal logging*, *illegal fishing*, dan penyelundupan, baik itu berupa barang maupun orang secara illegal, serta (3) Ancaman navigasi terkait pelayaran yang melewati perairan Indonesia (BPPK-Kementerian Luar Negeri: Pp. 47-48)

Demi melindungi aset kekayaan maritimnya, Indonesia telah memiliki dasar hukum guna menggeser paradigma nasional menuju “negara maritim”, yaitu, UUD 1945 Pasal 25A yang

berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Pasal ini memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sarat dengan isu kemaritiman.

Pengertian “negara maritim” dalam konteks ini adalah negara yang mampu mengelola laut untuk kepentingan nasionalnya secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun berdasarkan definisi tersebut, hingga kini Indonesia belum menjadi negara maritim. Statusnya baru sebatas “negara kelautan” dan “negara kepulauan”.

Adanya fenomena persaingan maritim internasional telah mendorong Indonesia untuk mengamankan kedaulatan dan aset-aset maritimnya demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Termasuk membangun keamanan maritim untuk mengantisipasi berbagai ancaman JSM Cina. Tujuannya agar Indonesia berhasil menjadi Poros Maritim Dunia sekaligus sebagai kunci stabilisator geoekonomi dan geopolitik di level regional maupun global. Untuk itu, Indonesia harus mampu mendefinisikan dengan jelas berbagai implikasi keamanan JSM Cina di level regional maupun global guna menentukan respon yang tepat dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal dan internal tersebut.

Keamanan maritim juga merupakan bagian dari kajian Hubungan Internasional di bidang studi politik internasional, terutama yang terkait dengan kebijakan luar negeri di sektor maritim yang dilatarbelakangi semangat kemaritiman kontemporer Indonesia berlandaskan Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014: *“Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”*.

Oleh karena itu, implikasi akibat kebijakan JSM Cina terhadap PMD Indonesia di bidang keamanan maritim dapat dianalisa dengan menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan *Sea Power*. Perwujudan PMD untuk mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia merupakan kebijakan luar negeri yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pemerintahan Jokowi. Karenanya, pengaruh kekuatan maritim yang asimetris dalam lingkungan internasional yang anarki akan mengubah pola interaksi serta peta kekuatan maritim dalam sistem internasional, baik itu di tingkat regional maupun global.

## **Landasan Teori**

*Sea Power* sebagai sumber kekuatan maritim yang melandasi kebijakan JSM Cina belum dimiliki PMD Indonesia. Berdasarkan sudut pandang Hubungan Internasional, implikasi negatif kebijakan JSM Cina terhadap Indonesia juga dapat dilihat dari kecenderungan ekspansif JSM Cina yang sangat *outward looking* terhadap PMD yang sifatnya *inward looking*.

Landasan teorinya terkait dengan kerangka pemikiran HI dan kajian maritim yang merujuk pada Teori Kebijakan Luar Negeri. Perspektif teoritis HI tersebut dilengkapi Teori *Sea Power* untuk memahami *existing condition* maritim dalam sistem internasional.

Pandangan Waltz sebagai penganut Perspektif Neorealis atau *Struktural Realism* ini sejalan dengan Teori Kebijakan Luar Negeri yang merupakan turunan dari Perspektif Neorealis. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk perilaku atau aksi. (1976: Pp. 16-17). Sedangkan menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., kebijakan luar negeri merupakan sekumpulan pilihan yang diambil atau diputuskan oleh koalisi, kelompok, maupun individu yang mempengaruhi dinamika lingkungan internasional (2010: 3).

Rosenau merumuskan sumber-sumber yang menjadi *input* dalam perumusan suatu kebijakan luar negeri (1976: 18) sebagai berikut: (1) Sumber sistemik (*systemic source*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara; (2) Sumber masyarakat (*societal source*), yaitu sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik; (3) Sumber pemerintahan (*governmental source*), yaitu sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan; (4) Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic source*), yaitu sumber internal yang memandang kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Berbagai sumber kebijakan luar negeri tersebut mempengaruhi bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) yang dilakukan pemimpin Cina dalam membuat langkah-langkah nyata, yaitu Jalur Sutra Maritim.

Dalam pandangan Alexander Mintz dan Karl DeRouen Jr. (2010: Pp. 121-132), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, yaitu (1) faktor internasional (faktor eksternal) yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berdasarkan situasi strategis; serta (2) faktor domestik (faktor internal) penentu kebijakan luar negeri terkait dengan politik domestik yang mempengaruhi dinamika pengambilan kebijakan luar negeri, kondisi ekonomi negara yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan, dan opini publik.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri menurut Mintz dan DeRouen Jr. tersebut dapat menjelaskan implikasi keamanan akibat kebijakan JSM Cina terhadap kebijakan PMD Indonesia. Artinya, perumusan kebijakan JSM Xi Jinping serta kebijakan PMD Jokowi terkait

dengan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan maritim Cina dan Indonesia.

Sedangkan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor domestik dipengaruhi proses pemilihan umum (pemilu) yang merupakan siklus rutin dalam setiap negara yang menjalankan sistem pemilu (Mintz & DeRouen Jr, 2010: 132). Hal ini wajar karena pemilu erat kaitannya dengan persaingan politik maupun opini publik yang mempengaruhi keputusan calon kandidat pemimpin dalam memandang lingkungan eksternalnya berdasarkan faktor domestik.

Pemimpin yang terpilih tentunya memiliki komitmen dengan konstituennya sesuai janji-janji kampanyenya. Begitu pula dengan visi PMD yang merupakan janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden tahun 2014. Setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 RI, visi tersebut disusun dalam bentuk kebijakan nasional. Sedangkan realisasinya di lingkungan eksternal dijadikan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia 2019.

Karena kebijakan PMD Indonesia bersifat *inward looking* dengan perspektif global, maka penjelasan mengenai implikasi keamanan kebijakan JSM Cina lebih sesuai jika dikaji berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Sedangkan faktor-faktor internal menurut Rosenau hanya dibatasi pada faktor politik domestik yang mempengaruhi dinamika pengambilan kebijakan luar negeri serta faktor kondisi ekonomi Cina dan Indonesia saat pengambilan kebijakan di bidang maritim. Sementara itu, pemahaman faktor eksternalnya difokuskan pada perilaku negara-negara lain dalam sistem internasional di kawasan Asia Pasifik, terutama AS dan

aliansinya, India, Jepang, Rusia, serta Korea Selatan yang sangat mempengaruhi eksistensi Cina di Asia Pasifik.

Akan tetapi, faktor-faktor internal dan eksternal sebagai instrumen kebijakan luar negeri versi Mintz dan DeRouen Jr. tersebut belum dapat menjelaskan kekuatan maritim yang ideal untuk bertahan pada posisi asimetris dalam lingkungan maritim internasional yang anarki. Karenanya, teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan *Sea Power*.

Meskipun teori Kebijakan Luar Negeri dan *Sea Power* berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda, terdapat relevansi yang saling melengkapi dalam mengkaji implikasi kebijakan JSM Cina terhadap realisasi kekuatan PMD Indonesia.

Alfred Thayer Mahan (1890) mengemukakan bahwa *Sea Power* merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara. Menurutnya, sarana (*means*) untuk mencapai *Kekuatan Maritim* dengan menggunakan kekuatan diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi yang diwujudkan melalui *maritime military diplomacy* (Willard, 2006).

Dalam teorinya tersebut, Mahan menginventarisasi enam komponen guna menjamin pengembangan kekuatan maritim suatu bangsa (<http://www.gutenberg.org/ebooks/13529>), yaitu (1) posisi geografi; (2) bentuk fisik wilayah berupa bentuk alamiah garis pantai; (3) luas wilayah yang meliputi perluasan teritorial (*extent of territory*); (4) jumlah penduduk; (5) watak atau karakter nasional bangsa; serta (6) sikap pemerintah berupa bentuk alamiah rezim yang sejalan dengan Teori Kebijakan Luar Negeri versi Mintz dan DeRouen Jr.

Keenam komponen *Sea Power* tersebut dapat menggambarkan kelemahan PMD Indonesia. Sebagaimana pandangan Astawa (2004) yang mengemukakan *Sea Power*

sebagai suatu kekuatan maritim, maka suatu negara dikatakan memiliki kekuatan maritim jika memenuhi enam elemen pokok berupa (1) *Geographical Position* sebagai posisi geografi yang memberikan keuntungan strategis bagi negara jika dapat memainkan perannya; (2) *Physical Conformation* terkait jumlah dan kedalaman pelabuhan yang dimiliki negara sebagai sumber kekuatan dan kemakmuran bangsa; (3) *Extent of Territory*, yaitu hubungan antara panjangnya garis pantai dengan tingkat kesulitan wilayah negara tersebut dipertahankan pada masa perang; (4) *Number of Population*, yakni jumlah populasi yang menentukan pengembangan kekuatan laut; (5) *National Character*, yaitu karakter populasi yang membentuk karakter pemerintahan; serta (6) *Character of Government* berupa kebijakan yang mempengaruhi pengembangan kekuatan laut.

Mahan menekankan pentingnya membangun kesatuan laut (*unity of the sea*) sebagai syarat mengawasi dan menguasai lautan dari pangkalan-pangkalan utamanya di darat (Astawa, 2012). Kekuatan laut ini diartikan sebagai kekuatan transportasi laut (*sea transportation power*) yang vital dan menghubungkan antarpasukan dengan sumber perbekalannya maupun antara *home front* dan *battle front*.

Meskipun demikian, sejumlah elemen tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu belum dapat menjelaskan secara komprehensif kondisi-kondisi geopolitik penentu kekuatan maritim di tingkat domestik, regional, dan global di lingkungan internasional yang anarki. Inti dari doktrin strategi Mahan adalah “keharusan menguasai lautan”. Padahal, strateginya hanya dapat dicapai oleh negara yang memiliki “kekuatan data offensif” dan Angkatan Laut yang besar untuk menguasai garis perhubungan laut sebagai syarat mutlak membangun konsentrasi kekuatan laut.

Sementara itu, relevansi kegunaan Teori *Sea Power* difokuskan pada sasaran kekuatan maritim Indonesia yang mengarah pada kepentingan keamanan maritim dalam menopang kekuatan geopolitik. Fokusnya pada aspek pengembangan *Sea Power* untuk memperkuat PMD Indonesia terkait implikasi keamanan maritim akibat kebijakan JSM Cina terhadap Indonesia. Karenanya, sebagai bagian dari kajian kebijakan luar negeri di bidang maritim, *Sea Power* mampu menggambarkan *existing condition* mengenai kelemahan kebijakan PMD Indonesia dalam menghadapi kekuatan maritim Cina.

Interaksi yang terbentuk antara kebijakan JSM dan PMD berupa interaksi maritim yang asimetris, yaitu, interaksi yang berkembang antara negara superior yang direpresentasikan oleh Cina dan negara inferior yang direpresentasikan oleh Indonesia. Dalam interaksi asimetris tersebut, Indonesia sebagai “negara kepulauan” yang kaya dengan aset maritimnya namun memiliki posisi inferior karena memiliki *sea power* yang lemah, telah memunculkan kebutuhan terhadap pentingnya memiliki kebijakan maritim yang terkonsolidasikan dengan aspek kebijakan luar negeri. Kebijakan ini penting dalam memecahkan berbagai persoalan guna memperkuat dan membalikkan posisi asimetris Indonesia agar dapat keluar dari lingkungan maritim yang didominasi *great powers*.

Persepsi terhadap implikasi negatif akibat kebijakan maritim negara lain dan konsep kepulauan juga turut menjadi pertimbangan determinan kebijakan luar negeri yang berorientasi maritim. Indonesia sebagai negara yang inferior secara maritim dan posisi interaksinya berada di bawah dominasi *great powers* harus bisa mengkalkulasikan kebijakan maritimnya secara terarah, terukur, dan terencana guna menghasilkan suatu kebijakan maritim yang posisinya menguntungkan.

Pemikiran ini didasari oleh asumsi dasar dari dua teori yang relevan, yaitu Teori Kebijakan Luar Negeri menurut Mintz dan DeRouen serta Teori *Sea Power* menurut Mahan. Ketiga aspek *Sea Power* yang dapat menjelaskan implikasi negatif di bidang keamanan maritim akibat kebijakan JSM Cina terhadap PMD Indonesia tersebut adalah (1) kontrol lalu lintas komersil dan perdagangan internasional; (2) kemampuan operasi tempur Angkatan Laut (AL) dan penggunaan instrumen AL dalam aspek diplomasi; serta (3) sebagai penggetar (*deterrence*) dan pengaruh politik pada masa damai.

Posisi geografis, bentuk fisik wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter nasional bangsa, serta sikap pemerintah merupakan sarana penting bagi tercapainya kekuatan maritim. Enam persyaratan tersebut dapat diwujudkan melalui *maritime military diplomacy* dengan menggunakan empat kekuatan diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi.

Kedua perspektif teoritis tersebut beserta asumsi-asumsi dasarnya dapat menjelaskan berbagai faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan JSM Cina sehingga berimplikasi terhadap keamanan maritim Indonesia. *Input* mengenai kelemahan tersebut dapat menjadi *output* bagi kebijakan keamanan maritim yang relevan dalam merealisasikan PMD Indonesia, terutama untuk menghadapi implikasi negatif di bidang keamanan maritim akibat kebijakan JSM Cina yang berpotensi menghambat realisasi PMD Indonesia.

Persepsi tersebut dipengaruhi oleh *existing condition* terkait berbagai kelemahan kebijakan PMD Indonesia. Implikasi negatifnya muncul akibat kebijakan JSM yang dilandasi sejumlah faktor domestik dan eksternal Cina untuk menggeser hegemoni AS.

Faktor-faktor ekonomi sebagai pendorong ekspansi maritim Cina telah meningkatkan agresivitasnya dalam mengejar kepentingan nasional melalui JSM, yakni membangun kekuatan maritim yang bersifat *outward looking* dengan perspektif regional. Pada saat yang sama, tindakan ekspansif Cina menimbulkan implikasi negatif terhadap PMD Indonesia karena kedua negara memiliki kebijakan di bidang keamanan maritim yang saling bersinggungan dalam beberapa hal.

Meskipun mulanya JSM hanya memiliki perspektif regional, namun melalui ekspansi yang didukung kapabilitas maritimnya, Cina tak hanya mendominasi kekuatan maritim di level regional, tapi juga pada level global. Jika Indonesia mampu menjadi kekuatan maritim superior di kawasan, maka PMD tak lagi hanya menjadi objek bagi kebijakan JSM Cina. Karenanya, untuk mengimbangi kebijakan ekspansif JSM tersebut, Indonesia harus membangun kekuatan maritim yang relatif sama guna menyeimbangkan posisinya yang inferior dalam interaksi maritimnya dengan Cina.

Dengan demikian, sejumlah komponen untuk meningkatkan kekuatan maritim Indonesia terdapat dalam posisi geografi; bentuk fisik wilayah; luas wilayah; jumlah penduduk; watak atau karakter rakyat; dan sikap pemerintah maupun aspek-aspek kekuatan maritim dalam melakukan: (1) kontrol lalu lintas komersil dan perdagangan internasional; (2) kemampuan meningkatkan operasi tempur maupun penggunaan instrumen Angkatan Laut dan Angkatan Udara (*hard power*) yang diiringi pelaksanaan diplomasi maritim (*soft power*); serta sebagai upaya *deterrence* dalam menghadapi berbagai implikasi negatif akibat kebijakan JSM Cina terhadap kebijakan PMD Indonesia dalam aspek kekuatan maritim.

## **Implikasi Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Kekuatan Maritim Indonesia**

Unipolaritas dan multipolar dalam sistem internasional pasca Perang Dingin menyebabkan banyak negara di dunia memiliki kesempatan dan peluang yang sama guna menumbuhkan potensinya di berbagai bidang untuk menguasai dunia (Zakaria, 2012: Pp. 4-5). Menurut Kenneth Waltz, kompetisi dalam sistem multipolar lebih rumit daripada sistem bipolar karena adanya ketidakpastian tentang kemampuan komparatif negara yang selalu berkembang (Waltz, Summer 2000: 5). Meskipun demikian, situasi dalam sistem internasional saat ini dapat dikatakan sebagai sistem unipolar terbatas. Artinya, satu kekuatan berfungsi sebagai dominasi pusat tetapi tingkat kontrolnya tetap terkendali karena AS sebagai hegemon juga menjalin hubungan dan saling bergantung dengan negara lain (Rourke, 2005: 44).

Perkembangan kebangkitan negara lain memberikan “kejutan” yang menarik karena berpotensi melakukan *counterbalance* kepada AS dan sekutunya. Sehingga, AS bukan lagi kontestan tunggal dalam sistem internasional. Pergeseran dalam sistem internasional pasca Perang Dingin dari sistem bipolar menjadi unipolar kini memiliki kecenderungan menjadi multipolar terkait munculnya sejumlah kekuatan baru di tingkat global. Salah satunya adalah kebangkitan Cina yang menjadikan JSM sebagai kebijakannya dalam mewujudkan “*Chinese Dream*”.

Sedangkan sistem internasional di kawasan Asia Pasifik dalam tataran makro-strategis dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu, perimbangan kepentingan prioritas kebijakan Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia; permasalahan “duo Korea”; serta energi kawasan (<https://theglobal-review.com/asia-pasifik-dalam-pusaran-kekuatan-kekuatan-global/>).

Sementara itu, daya tawar aktor-aktor negara pemegang kunci di kawasan didasari oleh konstelasi politik internasional Asia Pasifik yang mengutamakan kekuatannya. Hal ini sejalan

dengan pemikiran Henry Kissinger bahwa “*Power was relatively homogeneous; its various elements -economic, military or political- complemented one another*” (Kissinger, 2002).

Berikut ini sejumlah faktor eksternal maupun internal Cina dipersepsikan mengancam kekuatan maritim di kawasan Asia Pasifik. *Pertama*, Cina adalah kekuatan imperial dengan sejarah masa lalu yang diwarnai oleh ekspansi dan dominasi militer. *Kedua*, Cina adalah negara yang sedang tumbuh dan dipandang mampu menantang hirarki kekuatan yang telah mapan sehingga bisa mengancam stabilitas keamanan. *Ketiga*, Cina adalah negara yang selalu dianggap kurang puas dengan kedaulatan teritorial dan perbatasannya sehingga mencoba mengatasi ketidakpuasannya tersebut melalui cara-cara militer. *Keempat*, pesatnya pembangunan kekuatan militer Cina termasuk kekuatan lautnya yang seiring dengan peningkatan kebutuhan energi dan pangan Cina telah mendorongnya untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau akuisisi wilayah.

Sementara itu, perkembangan sejarah persaingan antara kekuatan besar dunia tak lepas dari persaingan untuk menguasai wilayah lautan. Sedangkan wilayah laut yang menjadi perhatian banyak negara adalah Samudera Pasifik karena sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonomi dan pertahanannya di wilayah ini (Rachmat, 2015: 10).

Jika dikaitkan dengan lingkungan eksternal Cina di kawasan Asia Pasifik, maka Cina menganggap bahwa AS telah mendominasi kekuatan maritim di wilayah Pasifik dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dominasi tersebut membatasi keleluasaan ruang gerak Cina dalam meningkatkan kembali eksistensi negaranya di bidang militer.

Kekhawatiran Cina terhadap dominasi AS serta kegagalannya merespon kondisi tersebut mengakibatkan Cina

merevisi misi Angkatan Bersenjata Cina/*People Liberation Army (PLA)* guna meningkatkan kepentingan strategisnya pada level global, menjamin keamanan perkembangan ekonomi nasional, serta kedaulatan teritorial (Sharman, 2014: 5).

Pembangunan kekuatan PLA berjalan seiring perkembangan ekonomi Cina. Sorotan terhadap pengembangan Angkatan Laut Cina/*People Liberation Army Navy (PLAN)* dan Angkatan Udara Cina/*People Liberation Army Air Force (PLAAF)* semakin menguat seiring pencapaian teknologi persenjataannya. Sebagai kekuatan maritim strategis, PLAN sangat penting dalam melindungi kepentingan ekonomi, kepentingan di bidang maritim, serta mengoptimalkan operasi pertahanan laut Cina (Muhammad, 2009: 419).

Di samping itu, Cina memiliki kemampuan mengadaptasi dan memproduksi secara mandiri berbagai kapal, perlengkapan pendukung, maupun persenjataan sebagai modal untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas postur PLAN (Chang, 2012: 23).

Begitu pula dengan kemampuan *Research and Development (R and D)* Cina secara mandiri dalam mendukung pelaksanaan serta evolusi doktrin pertahanan lautnya (O'Rourke, 2013: 3). Demi perluasan kapabilitas *maritime surveillance* di tingkat regional, *R and D* Cina juga tengah membangun sejumlah kapal selam baru dan memodernisasi persenjataannya (Lisbet, 2012: 7). Pengembangan dan penyebaran *Anti-Ship Ballistic Missiles (ASBM)* Cina turut meningkatkan kemampuan militernya di bidang persenjataan sehingga menempatkan PLAN sebagai posisi terbaik dalam jajaran Angkatan Laut dunia (Chang, 2010: 1).

Kekuatan maritim ini juga didukung oleh kepemilikan kapal selam nuklirnya. Bahkan, Cina telah meningkatkan

kemampuannya untuk melakukan serangan amfibi yang didukung oleh dua kapal *Landing Platform Dock (LPDs)* kelas Yuzhao, sehingga mampu melaksanakan misi penyerangan dari kapal ke daratan dengan mudah. Bahkan, Angkatan Udara Cina (PLAAF) juga berperan menopang operasi maritim PLAN. Demi meningkatkan daya jelajah armada tempur dalam mendukung operasi maritimnya, PLAAF pun memodifikasi pesawat pembomnya menjadi pesawat tanker yang berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar pesawat tempur maupun pesawat pengintai di udara (Chang, 2009: 23).

Kemampuan tersebut menjadi penting karena PLAAF mampu mengimbangi strategi “*far seas*” yang dijalankan PLAN. Dengan kekuatannya, PLAAF mampu meningkatkan kemampuan *air superiority* maupun *direct strike mission*. Sinergi antara PLAN dan PLAAF merupakan kombinasi yang sangat kuat dalam mengamankan seluruh kepentingan nasional Cina, terutama kepentingan maritimnya dari gangguan pihak lain dalam mengimplementasikan kebijakan JSM.

Di sisi lain, respon Indonesia terhadap kontestasi Cina dan AS di kawasan Asia Pasifik tak menghendaki kawasan ini menjadi arena persaingan politik di antara keduanya. Sementara itu, AS beserta barisan Quad (Australia, Jepang, dan India) perlahan menurunkan kualitas peran ASEAN dengan meningkatkan keterlibatan India sebagai aktor baru untuk menghadapi Cina. Padahal, Indonesia adalah tulang punggung kekuatan non-blok melalui kebijakan luar negerinya yang bebas-aktif (<https://news.detik.com/kolom/d-4477622/diplomasi-indonesia-merangkul-indo-pasifik>).

Asia Pasifik sangat penting bagi Indonesia mengingat kawasan ini berisi 3/5 populasi dunia dengan total GDP mencapai hampir USD52 triliun, sehingga stabilitas dan kerja sama yang inklusif sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan di kawasan. Untuk itu, Indonesia berinisiatif menggalang dialog kerja sama di kawasan Asia Pasifik untuk menciptakan zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas (P.L.E. Priatna, 2019).

Sedangkan kebijakan luar negeri Cina berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internalnya dipengaruhi oleh keberadaan AS dan rivalitas kekuatan maritimnya yang menciptakan berbagai konflik di Asia Pasifik. Kehadiran AS dalam konflik terkait dengan adanya potensi gangguan terhadap kepentingan nasional AS di kawasan tersebut, sehingga mendorongnya berhadapan dengan Cina sebagaimana yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan (LCS).

Asia Pasifik telah menjadi ajang pertarungan bagi dua negara, di mana Cina sebagai *the new emerging maritime power* dan AS sebagai *establish maritime power* berupaya saling menunjukkan kekuatannya di bidang maritim. Rivalitas antara Cina dan AS tak hanya dalam konteks kepemilikan persenjataan, namun juga dalam aksi provokasi terkait manuver kedua negara tersebut di LCS. Pada saat yang sama, Indonesia melalui kebijakan Poros Maritim Dunianya juga berpeluang muncul sebagai aktor baru yang akan meramaikan dinamika maritim Asia Pasifik.

Akan tetapi, peluang tersebut terhalang oleh perkembangan isu konflik LCS akibat klaim sepihak Cina bahwa wilayah LCS merupakan bagian dari teritorialnya berdasarkan faktor historis. Klaim *Nine Dash-Lines* tersebut terkait dengan posisi strategis LCS sebagai jalur utama perdagangan dunia melalui laut dari dan menuju Asia-Pasifik. Secara tidak langsung, lalu lintas maritim di sekitar LCS juga merupakan bagian dari implementasi PMD Indonesia.

Selain LCS, di sekitar Kepulauan Natuna dan Kepulauan Spratly banyak terdapat kandungan minyak bumi, gas alam, dan mineral. Hal ini mengindikasikan bahwa eskalasi konflik LCS juga berpotensi menyeret keterlibatan Indonesia ke dalam konflik tersebut. Demi mengamankan wilayah kedaulatan NKRI di perairan Natuna Utara dan kepentingan PMD di Asia, maka Indonesia harus bersikap tegas dan mampu mengantisipasi agresivitas Cina yang ekspansif.

Eskalasi konflik di LCS yang masih disengketakan Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara semakin meningkat akibat kehadiran militer Cina di kawasan. Insiden Natuna pada Maret 2016 pernah menyeret keterlibatan Indonesia terkait konflik LCS. Menteri Luar Negeri RI, Retno L. Marsudi, memprotes Cina yang melanggar hak berdaulat atas yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan di landas kontinen, melanggar upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia, serta melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Namun, insiden Natuna ini tak mengejutkan karena menurut pakar hukum maritim AS, Peter Dutton, Cina telah lama mengklaim kedaulatannya terhadap Natuna yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia. Bahkan, Undang-undang Perikanan Cina telah mengizinkan para nelayannya mencari ikan di wilayah yang secara unilateral ditandai sebagai *Nine Dash-Lines* di LCS yang juga bersinggungan dengan ZEE Indonesia di Natuna

(<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/118758249/pakar-maritim-amerika-insiden-natuna-tak-mengejutkan-cina>).

Klaim tersebut mengindikasikan ambisi Cina untuk memperkuat posisi militernya di Asia Pasifik. Ambisinya tampak pada kebijakan Presiden Xi Jinping yang memaknai kebangkitan rakyat Cina secara berbeda daripada pemimpin-pemimpin

sebelumnya. Penegasan Xi Jinping dalam menggapai “Impian Cina” melalui kebijakan JSM-nya telah menunjukkan ambisi Cina untuk menguasai dunia. Hal ini tercermin dari penetapan tiga prasyarat untuk mencapai “Impian Cina” pada awal 2013. *Pertama*, “Impian Cina” hanya dapat dipenuhi dengan menyusuri kembali Jalur Sutra Cina. *Kedua*, mewujudkan “Impian Cina” berarti selalu menyebarkan semangat Cina. *Ketiga*, mewujudkan “Impian Cina” membutuhkan konsentrasi dan kristalisasi kekuatan Cina (Wo-Lap Lam, 2015: 82).

Ketiga prasyarat tersebut erat kaitannya dengan kerentanan energi akibat ketergantungan Cina terhadap pasokan sumber energi minyak bumi dan gas alam impor. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan energi asing telah menciptakan ketidakstabilan. Di sisi lain, kontrol AS terhadap pasokan minyak global dan jalur komunikasi laut (SLOCs) di Asia memperburuk kekhawatiran Cina tentang “hegemoni” global AS. Kekhawatiran tersebut menimbulkan persepsi ancaman bagi keberlangsungan masa depan ekonomi Cina. Hal ini kemudian mendorong Cina bersikap ekspansif dan tak segan mengintervensi teritorial negara lain melalui kebijakan JSM-nya.

Oleh karena itu, Cina pun memberikan peran yang lebih luas pada Angkatan Bersenjata (PLA) mulai perencanaan hingga dalam pengambilan keputusan yang terkait strategi “keamanan energinya” (Collins, Erickson, Goldstein, and Murray, eds., 2012: Pp. 2-3), di mana faktor “dilema keamanan energi” merupakan ancaman internal sekaligus eksternal bagi pengembangan Angkatan Bersenjata Cina.

Untuk itulah Cina menerapkan kebijakan luar negeri yang progresif dan cenderung ekspansionis guna mendukung kebijakan keamanan maritimnya melalui peningkatan kekuatan militernya dalam menghadapi sistem internasional yang anarki. Implementasinya dilakukan dengan memperkuat kemampuan

PLAN dalam pencegahan strategis dan serangan balik, manuver maritim, operasi gabungan di laut, pertahanan menyeluruh, serta dalam memberikan dukungan komprehensif.

Selain itu, kemampuan perang informasi dan *cyber* yang dimiliki Cina terkait dengan kebijakan luar negerinya dalam merealisasikan JSM. Melalui strategi Anti-Akses/*Area-Denial*, Kontra-Intervensi dan Proyeksi Daya, Cina mencirikan strategi militer Angkatan Lautnya sebagai “pertahanan aktif”. Artinya, “defensif secara strategis, tetapi proaktif dalam orientasi”. Ahli strategi PLAN menyadari perlunya menciptakan “blokade informasi” untuk membangun “dominasi informasi” dalam mencapai superioritas di laut dan udara. Strategi “pertahanan aktif” Cina ini berperan penting dalam meningkatkan kekuatan militer JSM yang difokuskan pada kemampuan “perang *cyber*”, yakni dengan menggabungkan kemampuan “damai dan militer” serta mengintegrasikan kemampuan “sipil dan militer”. Tujuannya adalah melumpuhkan lawan dan memperoleh kemenangan hanya dalam satu kali serangan melalui kemampuan “blokade informasi” dan “dominasi informasi” (Krepinevich, 2017: 33).

Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan Cina terhadap stabilitas sistem internasional sebagai suatu “faktor ketidakpastian, ketidakstabilan, dan ketidakamanan”. Pandangan tersebut menjelaskan alasan Cina bahwa kekuatan militer dinilai lebih penting dalam melindungi keamanan nasionalnya (*Cina’s National Defense in 2004*: Pp. 2–4. Retrieved from <http://english.people.com.cn/whitepaper/defense2004/defense2004.html>. p. 2).

Dalam memperkuat kapabilitas militernya di Asia, selain meningkatkan kemampuan alutsista untuk kepentingan perang konvensional, Cina juga memfokuskan perhatiannya pada metode perang asimetris. Peningkatan kemampuan militer Cina di bidang maritim juga bisa dilihat dari latihan rutinnya di LCS

beserta patroli kapal selam nuklirnya ke wilayah timur dan Guam. Sensitivitas Cina untuk mempertahankan SLOCs semakin meningkat akibat meningkatnya ketergantungan Cina pada jalur laut pasokan energi impornya yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, Teluk Persia, dan Afrika (*For a recent example of this speculation, see Bill Gertz. 18 January 2005. "Cina Builds Up Strategic Sea Lanes."*).

Pada saat yang sama, pengerahan sejumlah unit kapal perang pengendali laut (*Surface Action Group/SAG*) Cina di Selat Malaka disertai satu atau dua kapal selam maupun kapal pengisian bahan bakar di LCS, telah memperlihatkan niat Cina yang berpotensi mengancam keamanan maritim Indonesia. Kecuali, jika terdapat kesepakatan mengenai tanggung jawab bersama untuk melindungi keamanan Selat Malaka (Goldstein & Murray, October 2004).

Karenanya, eskalasi konflik LCS memungkinkan perkembangan kehadiran militer Cina di Selat Malaka dalam skala besar. Jika diperlukan, kekuatan militer tersebut sewaktu-waktu dapat dialihkan untuk mengancam keamanan wilayah pesisir dan negara-negara sekitar Selat Malaka. Upaya peningkatan kekuatan pertahanan Cina tersebut tak lepas dari fokus pembangunan dan pengembangan kemampuan industri pertahanannya selama 25 tahun terakhir, di mana dalam lima tahun terakhir Cina berhasil membuktikan komitmennya membangun kompleks industri pertahanan secara mandiri.

Perkembangan industrialisasi yang sangat pesat mengakibatkan Cina cenderung ekspansif dalam upayanya memenuhi pasokan energi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Bahkan, PLAN telah meningkatkan agresivitasnya di LCS dengan mengklaim kehadirannya sebagai bagian dari strategi ekspansionisnya yang mengancam keamanan maritim di kawasan itu. Cina juga mengarahkan kekuatan militernya ke Asia

Tenggara yang merupakan sumber pasokan energi sekaligus kawasan strategis bagi Cina. Penguatan kapasitas AL Cina juga telah menimbulkan implikasi negatif bagi Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dalam menguasai lautan melalui kebijakan PMD-nya.

Selain kapal induk, Cina juga memiliki kapal dan tonase “kombatan permukaan” yang jumlahnya terus bertambah sejak pertengahan 1980-an. Modernisasi kombatan kapal perusak Cina tersebut mengindikasikan peningkatan kekuatan PLAN, termasuk upayanya memperkuat kemampuan udara sekaligus kekuatan dasar laut, permukaan, dan kekuatan pesisir Angkatan Lautnya (Loo, 2008: Pp. 187-188).

Pengembangan kekuatan PLAN tersebut tampaknya tak hanya ditujukan sebagai upaya *deterrence* Cina terhadap negara lain yang berpotensi menghambat Jalur Sutra Maritimnya, namun sewaktu-waktu dalam kondisi kritis juga dapat dikerahkan di sepanjang lintasan JSM-nya. Pengembangan kemampuan logistik PLAN juga bertujuan memperkuat pertahanan maritim Cina. Hal ini semakin membuktikan keseriusannya dalam mengamankan kepentingan JSM-nya di segala lini. Antara lain, memfokuskan penguatan kemampuan tempur Angkatan Udara Cina (PLAAF) untuk mendukung dan melindungi operasi-operasi militer PLAN.

Di sisi lain, jika kebijakan PMD Indonesia dikaitkan dengan Komunitas ASEAN, maka terdapat kemungkinan Indonesia dapat terseret ke dalam pusaran arus konflik LCS terkait klaim “*Nine Dash-Lines*” Cina di wilayah tersebut. Meski Indonesia tidak termasuk dalam *claimant state*, perannya tetap penting sekalipun Indonesia sudah menyatakan netralitasnya. Melalui kebijakan Poros Maritim Dunia, Indonesia sudah menegaskan bahwa “Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, maka

Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim”.

Sementara itu, segitiga hubungan antara Indonesia dengan Cina dan AS jika dilihat dari perspektif Indonesia, maka posisi Indonesia “terjepit” di antara arena permainan kekuasaan global yang didominasi dua kekuatan besar Cina dan AS. Sedangkan keterlibatan Indonesia dalam politik internasional cenderung pasif karena kebijakan luar negerinya selama ini hanya didorong untuk menggunakan posisi kritis bagi kepentingan nasional Indonesia.

Bahkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Cina dan AS tak lebih dari upaya untuk mengamankan posisi sendiri berdasarkan berbagai pertimbangan domestik. Indonesia tampaknya cenderung bermain aman karena lebih memilih “jalan tengah” (Widjajanto, 18 Agustus 2016). Sedangkan Agus Purwoto memandang bahwa kebijakan JSM Cina ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi perwujudan PMD Indonesia (Purwoto, 22 Agustus 2016).

Oleh karenanya, untuk mengimbangi kekuatan maritim Cina yang berimplikasi negatif terhadap keamanan PMD, Indonesia harus meningkatkan kemampuan dan kepekaannya dalam mempersepsikan berbagai implikasi negatif yang mengancam keamanan maritimnya secara internal maupun eksternal. Selain itu, kepemimpinan Indonesia untuk mengutamakan kerja sama maritim dalam *East Asia Summit (EAS)* harus terus ditindaklanjuti, antara lain dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada Samudera Hindia melalui *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

Setidaknya terdapat empat hal penting dalam merumuskan konsep keamanan maritim sebagai salah satu dari lima pilar PMD Indonesia. *Pertama*, pemerintahan Jokowi harus menetapkan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam konsep keamanan

maritim Indonesia, yaitu, aktor negara dan siapa saja aktor non-negaranya. *Kedua*, menentukan makna kedaulatan maritim dan batas-batas maritim yang jelas bagi Indonesia. *Ketiga*, menetapkan isu maritim sebagai prioritas dalam kepentingan nasional Indonesia. *Keempat*, konsep keamanan maritim sebagai keamanan nasional Indonesia yang diproyeksikan menggunakan pendekatan ancaman militer sekaligus non militer.

Perumusan konsep keamanan maritim juga terkait dengan tugas pokok TNI berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman maupun gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keberhasilan perwujudan cita-cita PMD pada masa mendatang sangat tergantung pada keberhasilan TNI sebagai instrumen yang mencerminkan kekuatan pertahanan negara.

Untuk itu, kemampuan dan kapabilitas TNI AL harus ditingkatkan, termasuk kemampuan diplomasi dalam membangun kepercayaan dan kerjasama militer dengan negara lainnya di kawasan Asia untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagaimana modernisasi kekuatan PLAN Cina untuk mendukung perwujudan JSM, maka Indonesia dalam upayanya mewujudkan PMD juga sudah semestinya melakukan revitalisasi dan rehabilitasi seluruh kapabilitas militer Angkatan Lautnya.

Hal ini penting dalam merespon kelemahan pertahanan maritim Indonesia berdasarkan faktor internalnya. Jika dibandingkan dengan kekuatan militer Cina, maka kapabilitas pertahanan maritim Indonesia masih jauh tertinggal dari Cina. Dimensi keamanan maritim Indonesia erat kaitannya dengan aspek pertahanan dan keamanan serta kemampuannya dalam

melindungi wilayah perairannya. Akan tetapi, tampaknya masih terdapat sejumlah kelemahan internal terkait dimensi keamanan maritim.

Kelemahan dalam aspek keamanan maritim Indonesia tampak dari sejumlah fakta yang cenderung memprioritaskan porsi pengembangan Angkatan Darat (AD). Sehingga, pengembangan potensi kekuatan Angkatan Lautnya menjadi tidak maksimal (<http://kemlu.go.id/bppk/id/blog/Pages/Mempersiapkan-Ekonomi-Tangguh-Di-Sektor-Maritim-Menuju-Poros-Maritim-Dunia.aspx>).

Masalah krusial lainnya tampak pada belum optimalnya fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai *leading sector* dalam mengamankan maritim nasional karena masih terdapat ego sektoral antarlintas institusi di sektor maritim. Oleh karena itu, pemerintah harus memperjelas batas-batas kewenangan lembaga penegak hukum di bidang kemaritiman.

Apalagi, hingga kini Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki lembaga independen semacam Dewan Keamanan Maritim yang berperan mensupervisi, mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi realisasi PMD. Meskipun Indonesia telah memiliki Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kehadiran Dewan Keamanan Maritim tetap diperlukan karena akan mempengaruhi efektivitas kinerja penegakan hukum laut di wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya dalam menghadapi berbagai ancaman akibat ekspansi dan agresivitas kekuatan maritim Cina.

Sedangkan faktor eksternalnya tampak pada ambisi dan agresivitas Cina yang menyebabkannya menghindari pola kerjasama di bidang keamanan maritim. Kompetisi untuk mengamankan akses perdagangan laut ke pasar internasional

demi pemulihan ekonomi akan semakin ketat antara Cina dan Indonesia.

Sayangnya, Indonesia belum pernah berupaya mengamankan jalur ekspor-impornya yang melewati lintasan laut ke Eropa dan Amerika. Selama ini, kebijakan militer Indonesia yang seharusnya bersifat *outward looking* ternyata hanya terfokus pada “Wawasan Nusantara” sebagai strategi nasional Indonesia dan cenderung “berorientasi darat” (*land-base oriented*) yang justru bersifat *inward looking* (Widjajanto, 18 Agustus 2016).

Sedangkan berbagai faktor eksternal yang berimplikasi negatif tersebut cenderung bersifat *outward looking* dan berorientasi pada ancaman militer. Oleh karena itu, pemahaman *outward looking* yang tepat sangat penting dalam mendorong manuver, eksplorasi, dan mencapai kepentingan nasional dengan memanfaatkan laut sebagai lalu lintas utamanya (Son Diamar, Maret 2016). *Outward looking* ini erat kaitannya dengan pilar “keamanan maritim” di bidang pertahanan, ketahanan (*resilience*), serta upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman eksternal (<https://alumniunair.com/negara-maritim-tanpa-menguasai-laut/>).

## **Penutup**

Implikasi negatif akibat kebijakan JSM Cina terhadap PMD Indonesia di bidang keamanan maritim tercermin dari kekuatan geopolitik Cina yang lebih unggul daripada Indonesia. Antara lain, dengan membangun sejumlah pelabuhan di negara lain yang diduga menjadi pangkalan militer Cina di sepanjang lintasan JSM-nya seperti di Srilanka, Bangladesh, dan LCS. Sedangkan pada saat yang sama, Indonesia justru masih terfokus pada pembangunan keamanan maritim di level domestik.

Hal ini tidak mengherankan karena Cina bahkan telah merealisasikan kebijakan JSM-nya jauh sebelum JSM Cina Abad ke-21 diumumkan, yakni sejak akhir tahun 1970-an dengan melakukan berbagai reformasi dan modernisasi kebijakan maupun strategi di bidang ekonomi dan militer. Implementasinya dilakukan secara bertahap, progresif, konsisten, dan menyeluruh dengan proyeksi untuk jangka waktu hingga 60 tahun ke depan.

Sebaliknya, Indonesia jauh tertinggal di belakang Cina. Saat mengumumkan visi PMD pada November 2014 dalam forum internasional *East Asia Summit* di Nay Pyi Taw, Myanmar, Indonesia justru belum memiliki konsep mengenai *grand strategy* sebagai geostrategi PMD serta pemetaan yang jelas bagi implementasi kebijakan PMD secara terukur, terarah, dan terencana untuk mencapai target dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Di sisi lain, Cina berhasil meningkatkan keamanan maritimnya dengan mereformasi strategi pertahanan serta memodernisasi kekuatan militernya, terutama kekuatan Angkatan Laut Cina dan kekuatan Angkatan Udaranya sebagai pendukung PLAN. Tujuannya adalah meningkatkan pengaruhnya di level global sekaligus mengarahkan kekuatan maritimnya untuk mengamankan perairan laut yang menjadi jalur pasokan energi impornya, jalur komersil, sekaligus jalur komunikasi di sepanjang rute yang dilintasi JSM.

Karenanya, Indonesia secara *inward looking* juga harus mampu menghadapi implikasi negatif akibat kebijakan JSM Cina di bidang keamanan maritim. Di antaranya dengan meningkatkan kemampuan *asymmetric war* berupa kekuatan teknologi informasi *cyber warfare* di laut. Peningkatan kemampuan teknologi *cyber warfare* ini sebagian besar difokuskan pada ketersediaan komponen perangkat lunak yang harganya tidak semahal biaya sistem persenjataan *hard power*. Peningkatan

kemampuan perang asimetris ini sangat penting dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, yaitu untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman eksternal maupun internal di sektor kemaritiman serta menguasai jalur komunikasi lalu lintas komersil, perdagangan, maupun pasokan sumber daya energi impor di lautan seluruh dunia.

Dengan demikian, agar Indonesia mampu memperkuat keamanan maritimnya dalam menghadapi agresivitas JSM Cina, maka selain bersifat *inward looking*, kebijakan PMD juga harus bersifat *outward looking* untuk mendorong pembentukan lembaga *strategic partnership* di bidang keamanan maritim pada level global.

## Daftar Pustaka

- Astawa, Ida Bagus Made. (2004). *Geografi Politik*. Singaraja. Fakultas Ilmu Sosial Undiksha Singaraja.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan RI, Laksamana Muda TNI (Purn) Agus Purwoto, Senin 22 Agustus 2016 di Gedung Kementerian Pertahanan RI, pukul 13.00-16.30 WIB.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) RI Kabinet Kerja sekaligus salah seorang perumus Poros Maritim Dunia Indonesia, Andi Widjajanto, pada Kamis, 18 Agustus 2016 pk. 13.00 WIB.
- BPPK-Kementerian Luar Negeri. *"Diplomasi Ekonomi Kelautan: Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim"*.
- Chang, F. K. (2012). China Naval Rise and South China Sea: an Operational Assessment. *Orbis*. 56 (1).
- Chang, F. K. (2010). Making Waves: Debates behind China's First Aircraft Carrier. *Foreign Policy Research Institute*. 1.
- Cina's National Defense in 2004*: Pp. 2–4. Retrieved from <http://english.people.com.cn/whitepaper/defense2004/defense2004.html>.

- Collins, Gabriel B., Erickson, Andrew S., Goldstein, Lyle J., and Murray, William S. (eds.), (2012). *China's Energy Strategy: The Impact on Beijing's Maritime Policies*. Maryland: Naval Institute Press.
- Disampaikan oleh Anggota Dewan Kelautan Indonesia, Son Diamar, dalam paparannya berjudul "Kebutuhan Kerjasama Internasional dan Inovasi Pengelolaan" dalam Seminar CSIS "Menuju Poros Maritim Dunia" pada Maret 2016. Djumala, 2 Januari 2015
- For a recent example of this speculation, see Bill Gertz. 18 January 2005. "Cina Builds Up Strategic Sea Lanes."*
- Goldstein, Lyle and Murray, William. (October 2004). "Cina Emerges as a Maritime Power," *Jane's Intelligence Review*.
- Jackson, Robert H., and Sorensen, Georg. (2007). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kissinger, H. (2002). *Foreign Policy: Crisis, Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century*.
- Krepinevich, Jr., Andrew F. (2017). *Archipelagic Defense: The Japan-US Alliance and Preserving Peace and Stability in the Western Pacific*. Tokyo: The Sasakawa Peace Foundation.
- Kymlicka, Will. (2004). *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*. Penerjemah Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lap Lam-Willy Lo. (2015). *Chinese Politics in the Era of Xi Jinping: Renaissance, Reform, or Retrogression?*. New York: Routledge.
- Lisbet. (2012). Peningkatan Kekuatan Militer China. *Info Hubungan Internasional*, 5(5).
- Loo, Bernard. (2008). "Military Modernization, Power Projection, and The Rise of the PLA: Strategic implications for Southeast Asia" dalam *Asian Security Studies*. New York: Routledge.

- Manyin, ME., et al. (N/A). *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" toward Asia*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Mahan, Alfred Thayer. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Paperback.
- Mintz, Alex and DeRouen Jr., Karl. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad, S. V. (2009). Pengembangan Kekuatan Militer China dan Dampaknya terhadap Kawasan Asia Timur. *Kajian*, 14 (3).
- O'Rourke, R. (2012). China Naval Modernization: Implication for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress. *Congres Research Service*, 3.
- Priatna, P. L. E. (2019). Diplomasi Indonesia Merangkul Indo-Pasifik. Diunduh dari <https://news.detik.com/kolom/d-4477622/diplomasi-indonesia-merangkul-indo-pasifik>.
- Rachmat, A. N. (2010). Dilema Dua *Superpower* dalam Masalah Taiwan. *Multiversa*, 1(2).
- Report on Marine and Ocean Industries Development in Cina* (2006).
- Rosenau, James N. (1976). *International Studies in a Transnational World*. California: University of Southern California.
- Rourke, J. T. (2005). *International Politics on the World Stage*. New York: McGraw-Hill.
- Sharman, C. H. (2015). China Moves Out: Stepping Stones toward a New Maritime Strategy. *Institute for International Strategic Studies. China Strategic Prespective*, (9). Washington D.C.: National Defence University Press.
- Waltz, K. N. (2000). Structural Realism after the Cold War. *International Security*.
- Zakaria, F. (2012). *The Post-American World*. (60594th ed.). W. W. Norton & Company.